



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec, Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1776/DJA.1/KU1/VIII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Anggaran
Bersumber PNPB TA 2024

Jakarta, 12 Agustus 2024

Kepada Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Syar'iyah Aceh
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan terbitnya surat Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-335/AG/AG.5/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Pengesahan revisi anggaran Ditjen Badan Peradilan Agama sebagai tindaklanjut surat kami Nomor 1290/DJA.1/RA.1.8/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 perihal Revisi anggaran PNPB, maka anggaran kegiatan "Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNPB" sudah masuk dan tertera pada DIPA masing-masing Pengadilan Tingkat Banding. Adapun pelaksanaannya mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan dapat dilaksanakan setelah terbitnya surat Maksimum Pencairan (MP) dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang saat ini masih dalam proses pengajuan;
2. Pelaksanaan kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tingkat Banding sekurang-kurangnya memuat tentang pelaksanaan kegiatan, penunjukkan tim pelaksana, penunjukkan peserta dan narasumber;
3. Rapat koordinasi dan bimtek pengelolaan PNPB dilakukan secara tatap muka (offline) dengan menghadirkan seluruh peserta dan narasumber dalam satu tempat yang sama;
4. Lokasi atau tempat pelaksanaan kegiatan mengacu pada akun yang tersedia pada petunjuk operasional kegiatan (POK) atau rincian kertas kerja satker;
5. Untuk kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor (hotel dan sejenisnya) berupa paket meeting (fullday/fullboard) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, harus melibatkan peserta dari K/L lainnya atau masyarakat;
6. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan pencetakan spanduk dapat dilakukan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan;



7. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja, dan untuk panitia dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebagai persiapan kegiatan;
8. Jumlah panitia kegiatan maksimal 10 (sepuluh) orang;
9. Jumlah peserta berasal dari satker Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang terkait dalam pengambil kebijakan dan pelaksanaan teknis administrasi perkara dan pengelolaan PNBPN;
10. Narasumber merupakan pejabat eselon III kebawah/yang disetarakan harus memiliki kemampuan perihal PNBPN dapat berasal dari internal Mahkamah Agung (Ditjen Badilag/BUA) atau eksternal (K/L lain) disarankan dari Kanwil DJPB atau KPPN setempat. Honorarium hanya dapat diberikan kepada narasumber yang berasal dari K/L lain, jika narasumber lebih dari 1 (satu) orang maka pemberian materi dapat dilakukan secara panel;
11. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Kebijakan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan PNBPN sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 57/KMA/SK/III/2019;
 - b. Mekanisme Pengelolaan PNBPN di Lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2959 Tahun 2019;
 - c. Tata cara penetapan target penerimaan dan mekanisme izin penggunaan anggaran PNBPN.
12. Tim Pelaksana wajib membuat laporan di akhir kegiatan rangkap 3 (tiga) dan dijilid, dengan outline sebagai berikut:
 - Bagian I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Dasar Hukum
 - Bagian II Pelaksanaan
 - a. Tim Pelaksana
 - b. Waktu dan tempat
 - c. Peserta dan Narasumber
 - d. Metode Pelaksanaan
 - Bagian III Biaya
 - Bagian IV Kesimpulan dan Saran
 - Bagian V Penutup
 - Lampiran :
 1. SK Pelaksanaan Kegiatan
 2. Surat Tugas



3. Biodata atau *Curriculum Vitae* (CV) Narasumber
 4. Materi Bimtek
 5. Daftar Hadir
 6. Notulen
 7. Dokumentasi
13. Ditjen Badan Peradilan Agama dan Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut, untuk itu kami minta agar jadwal rencana pelaksanaan dan narasumber dapat dikirimkan melalui link berikut <https://bit.ly/KorBimPNBP2024> paling lambat tanggal **30 Agustus 2024**.

Demikian petunjuk pelaksanaan ini agar dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terimakasih.

Wassalam.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS

Drs. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.M.
NIP. 196809041993031004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-335/AG/AG.5/2024 7 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Yth. 1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Nomor 1662/DJA/RA1.8/VII/2024 Tanggal 30 Juli 2024 Hal Usulan Revisi Anggaran, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Usulan Revisi Anggaran telah disahkan dan Database RKA-KL DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
2. Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan Ditjen yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi.
4. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, dalam mendukung Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan memegang teguh Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, serta menyelesaikan penugasan dengan penuh dedikasi, pelayanan prima, dan handal

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Anggaran Bidang Politik,
Hukum, Pertahanan dan Keamanan,
dan Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara



Ditandatangani secara elektronik
Dwi Pudjiastuti Handayani



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI
3. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas c.q. Direktur Hukum dan Regulasi
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
24. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
25. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
26. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
27. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
28. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
29. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
30. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
31. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
32. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
33. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
34. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
35. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku
36. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
37. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
38. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara

**DIGITAL STAMP USUL REVISI ANGGARAN 005.04 DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**

No	SATKER	DS Semula	DS Menjadi
1	309067 PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR	6486-6002-8014-5846	3577-9632-2500-6825
2	309124 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG	8576-5706-9025-4073	4764-2608-6022-8092
3	309125 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	2003-5718-5260-0307	7014-0184-4570-1733
4	401113 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA	7034-0701-1214-4587	1593-6090-3028-2335
5	401583 MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH	5210-7089-4430-0772	8152-3140-5752-6100
6	401778 PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	9994-6097-8227-0289	0021-6107-1541-4791
7	401901 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	2928-3363-1032-2610	9349-0834-7707-5350
8	402237 PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	5971-0559-0017-0139	0380-5500-6780-1564
9	402450 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	0080-9007-6088-3806	0089-1076-6370-0826
10	402481 PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA	9228-1802-5564-6463	0920-1982-9207-1172
11	402651 PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	5828-2689-1144-2300	5408-8143-5448-6170
12	402682 PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO	0200-6364-2040-0865	8108-7102-6099-5926
13	402711 PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON	6382-0430-4082-9010	6437-6656-8511-0500
14	402789 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM	1962-1177-1097-9688	0932-0219-3004-2109
15	402861 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA	2400-0573-2724-0288	7917-1149-8008-7080
16	402965 PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	4088-9844-0498-0566	8654-6232-0467-6291
17	402971 PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	0307-1877-4582-7850	9312-0051-1678-0447
18	402990 PENGADILAN TINGGI AGAMA PAANGKARAYA	0247-7471-9629-9377	3039-1979-8554-0850
19	440713 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN	6026-6046-8673-0064	1077-2933-4392-7610
20	440729 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANGKA BELITUNG	7052-0053-0350-6075	8784-0000-1198-9683
21	440735 PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO	0830-5333-4500-9123	5857-8609-1245-5449
22	440741 PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA	3038-7600-9394-9796	6030-0627-0609-1837
23	526709 Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau	8842-4067-4758-8288	0277-1200-2741-2852
24	526715 Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat	6376-1204-1071-6826	4509-1584-0366-7829
25	526719 Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	7022-3777-2980-4130	3353-0729-7593-6974
26	526723 Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	7231-0487-0017-5137	7239-9114-0138-5315
27	526727 Pengadilan Tinggi Agama Bali	0398-2026-8624-0560	7166-7300-2298-7607
28	547658 PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA	1010-2570-1884-9625	0331-6382-1349-7274



29	547662 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	7035-1075-7292-0326	2867-6059-3329-7766
30	547679 PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG	8910-6952-1925-7730	2708-4566-6789-3854
31	576250 PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU	9130-0007-2372-5938	1080-0171-0608-2420
32	576254 PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI	6296-0090-4885-1625	0202-1406-5267-0331
33	576261 PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG	0868-3166-0119-7189	3164-0601-1814-9723
34	576275 PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU	2357-0624-4195-0221	0006-7038-7500-8000
35	663712 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	4534-0285-5200-9650	9606-4519-9976-5997



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DAFTAR HASIL PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (DHP-RKAKL)
TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor : STAP-005.04-01/AG/2023

Berdasarkan hasil penelaahan RKA-KL T.A. 2024 sesuai Alokasi Anggaran T.A. 2024, maka dalam rangka penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2024, dengan ini ditetapkan hasil penelaahan alokasi anggaran untuk :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [005] MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : [005.04] Ditjen Badan Peradilan Agama

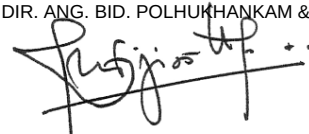
PAGU UNIT ORGANISASI : Rp. 135.205.164.000,-
*** SERATUS TIGA PULUH LIMA MILIAR DUA RATUS LIMA JUTA SERATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH ***

Pagu anggaran belanja tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : (dalam ribuan rupiah)

KODE	PROVINSI	JUMLAH SATKER	JUMLAH PAGU	CATATAN HAL IV	TARGET PENDAPATAN	
					PERPAJAKAN	PNBP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	DKI JAKARTA	7	65.735.679	0	0	1.771.165
02	JAWA BARAT	27	6.239.836	0	0	11.936.200
03	JAWA TENGAH	37	3.544.703	0	0	9.229.368
04	DI YOGYAKARTA	6	915.720	0	0	741.718
05	JAWA TIMUR	38	6.029.020	0	0	11.619.646
06	ACEH	24	2.832.589	0	0	1.059.426
07	SUMATERA UTARA	23	2.609.577	0	0	1.783.061
08	SUMATERA BARAT	19	2.785.500	0	0	1.076.708
09	RIAU	13	2.271.375	0	0	1.136.266
10	JAMBI	11	1.459.644	0	0	535.654
11	SUMATERA SELATAN	13	2.092.276	0	0	1.084.217
12	LAMPUNG	15	2.846.984	0	0	1.662.662
13	KALIMANTAN BARAT	12	2.045.075	0	0	842.000
14	KALIMANTAN TENGAH	14	1.639.750	0	0	476.337
15	KALIMANTAN SELATAN	14	1.828.313	0	0	1.010.037
16	KALIMANTAN TIMUR	10	1.754.596	0	0	1.015.766
17	SULAWESI UTARA	11	1.791.652	0	0	237.784
18	SULAWESI TENGAH	11	2.279.116	0	0	409.680
19	SULAWESI SELATAN	24	3.200.160	0	0	2.186.664
20	SULAWESI TENGGARA	11	2.169.459	0	0	514.666
21	MALUKU	7	2.180.130	0	0	173.849
22	BALI	10	635.144	0	0	158.048
23	NUSA TENGGARA BARAT	9	2.542.377	0	0	1.063.912
24	NUSA TENGGARA TIMUR	15	1.438.080	0	0	68.581
25	PAPUA	11	1.246.601	0	0	174.036
26	BENGKULU	10	1.390.379	0	0	463.216
28	MALUKU UTARA	5	900.397	0	0	189.631
29	BANTEN	7	2.010.334	0	0	2.247.065
30	KEP. BANGKA BELITUNG	5	960.790	0	0	322.619
31	GORONTALO	7	1.536.611	0	0	361.546
32	KEPULAUAN RIAU	7	982.280	0	0	439.393
33	PAPUA BARAT	5	1.392.285	0	0	107.129
34	SULAWESI BARAT	5	731.036	0	0	239.110
35	KALIMANTAN UTARA	4	1.187.696	0	0	169.369
JUMLAH		447	135.205.164	0	0	56.506.529
RINCIAN SUMBER DANA						
RM			112.568.614	0		
PNBP/BLU			22.636.550	0		
PHLN/PHDN			0	0		
SBSN-PBS			0	0		

Rincian alokasi anggaran untuk masing-masing Satuan Kerja ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran per Satuan Kerja T.A. 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara T.A. 2024, dan menjadi dasar penyusunan serta pengesahan DIPA T.A. 2024.

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam RKA K/L T.A. 2024 sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Jakarta, 05 Agustus 2024
a.n MENTERI KEUANGAN
DIR. ANG. BID. POLHUKHANKAM & BABUN

DWI PUDDJIASTUTI HANDAYANI
NIP.196601011991032001

